

ANALISIS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KUTAI KARTANEGARA

Mutya Listiani¹, Elfreda Aplonia Lau², Beatrix Tandirerung³

Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email : mutya.listiani@gmail.com

Keywords :

LRA,LPSAL,
Balance
Sheet,LO, LAK,
LPE,Notesto
Financial
Statements

ABSTRACT

The aim of the study was to analyze the items of the Budget Realization Report, the Reports on Changes in Budget Balance Reports, Balance Sheet posts, Operational Report items, Cash Flow Report items, Equity Change Report items, Notes Notes posts. Financial Report on BPKAD Kutai Kartanegara based on PP No. 71 of 2010 with the following research problems, the employee lacks or does not understand the accrual-based accounting system, so that almost all of them are left to superiors and there are delays in reporting financial statements.

Presentation of Financial Statements at BPKAD Kutai Kartanegara, the components of its financial statements, each item is incomplete and meets accrual-based government accounting standards PP No.71 of 2010. The basic theory used is public sector accounting that focuses on the presentation of regional financial statements, PP No. 71 of 2010. The research hypothesis is the posts of the Budget Realization Report, Reports on Changes in Budget Balance More, Balance Sheet posts, Operational Report posts, Cash Flow Report items, Equity Change Report items, Posts Notes to the Financial Statements preseted by BPKAD Kutai Kartanegara have not been in accordance with Government Regulation No. 71 of 2010. The Analysis tool used in this study is a comparative method, comparing the BPKAD financial statements of Kutai Kartanegara with PP No. 71 of 2010 using the Dean J. Champion formula in 1990.

The results showed that the first hypothesis was accepted that the presentation of Budget Realization Report posts was not appropriate, the second hypothesis is rejected the presetation of the Change Report Budget Budget posts are more suitable, the third hypothesis is accepted the presentation of Neraca posts is not appropriate, the fourth hypothesis is rejected, the presentation of Operational Report posts is quite appropriate, the fifth hypothesis is accepted the presentation of the items of the Cash Flow Statement is not appropriate, the sixth hypothesis is rejected the presentation of Equity Change Report posts is very appropriate, The seventh hypothesis is rejected by the presentation of the items. Notes the Financial Statements are very appropriate.

PENDAHULUAN

Pemerintahan yang baik adalah pemerintah yang dibentuk untuk penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif

menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politican framework bagi tumbuhnya aktifitas usaha. *Good governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggung jawabkan secara bersama. Sebagai suatu consensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Membentuk pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah dengan membentuk sebuah elemen yaitu partisipasi, transparasi, akuntabilitas. Partisipasi adalah kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil pemerintah. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi, efektifitas dan efisiensi suatu entitas laporan, dan membantu menentukan ketentuannya terhadap peraturan perundang – undangan.

Permasalahan yang terjadi pada BPKAD Kutai Kartanegara adalah pegawainya kurang atau belum sepenuhnya memahami sistem akuntansi khususnya berbasis akrual sehingga hampir semua diserahkan kepada atasan dan adanya keterlambatan dalam melaporkan laporan keuangan.

Penyajian Laporan Keuangan pada BPKAD Kutai Kartanegara, komponen laporan keuangannya, tiap pos – pos belum lengkap dan memenuhi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual PP Nomor 71 Tahun 2010 di antara lain Transfer/Bagi Hasil ke Desa, Pembentukan Dana Cadangan, Dana Otonomi Khusus, Pencairan Dana Cadangan, Bagi Hasil Retribusi, Bagi Hasil Pendapatan Lainnya, Pendapatan Dana Darurat, Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri Pemerintah Daerah-Lainnya yang terdapat di Laporan Realisasi Anggaran PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat pada Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kutai Kartanegara. Pinjaman Jangka Panjang, Premium (Diskonto) Obligasi, Investasi dalam Surat Utang Negara, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah, Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat, Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya yang terdapat di Neraca PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat pada Neraca BPKAD Kutai Kartanegara. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Provinsi, Aset Tetap, Aset Lainnya yang terdapat di Laporan Operasional PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat pada Laporan Operasional BPKAD Kutai Kartanegara. Pencairan Dana Cadangan, Penerimaan Dana Alokasi Umum, Penerimaan Dana Alokasi Khusus, Penerimaan Dana Otonomi Khusus, Penerimaan Dana Penyesuaian yang terdapat di Laporan Arus Kas PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat pada Laporan Arus Kas BPKAD Kutai Kartanegara. Selisih Revaluasi Aset Tetap yang terdapat di Laporan Perubahan Ekuitas PP Nomor 71 Tahun 2010 tidak terdapat pada Laporan Perubahan Ekuitas BPKAD Kutai Kartanegara.

Penyajian Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan sangat penting diterapkan agar laporan keuangan yang dikeluarkan oleh pemerintah agar dapat berguna bagi masyarakat, wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah.

Standar Akuntansi yang digunakan untuk membandingkan dan menganalisis penyajian laporan keuangan yang ada pada BPKAD Kutai Kartanegara adalah Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mana standar ini dibuat untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Basis akuntansi dalam penyajian laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah menganalisis pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, pos-pos Neraca, pos-pos Laporan Operasional, pos-pos Laporan Arus Kas, pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas, pos-pos Catatan atas Laporan Keuangan pada BPKAD Kutai Kartanegara berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi Sektor Publik Menurut Mardiasmo (2009:11) :

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat akuntansi yang dilakukan oleh lembaga – lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya yang dibandingkan dengan masa – masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga – lembaga publik.

Pengertian Laporan Keuangan, menurut Sadeli (2014:18) :” Laporan tertulis yang memberikan informasi kuantitatif tentang posisi keuangan dan perubahan – perubahannya, serta hasil yang dicapai selama periode tertentu”.

Pengertian Laporan Keuangan, menurut Najmudin (2011:63) : “Laporan Keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan, yang merupakan ringkasan dari transaksi keuangan yang terjadi selama tahun buku yang bersangkutan”.

Pengertian Laporan Keuangan Daerah Menurut Hariadi, Restitanto, dan Bawono (2010 : 122) :

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi, serta membantu ketaatannya terhadap Peraturan Perundang – undangan.

Penyajian Laporan Keuangan, menurut Lampiran I.02 PSAP 01 dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 :

1. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh

- pemerintah pusat atau daerah. Unsur – unsurnya yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos – pos sebagai berikut :
 - a. Saldo Anggaran Lebih Awal
 - b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
 - c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan
 - d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
 - e. Dan lain – lain
 - f. Saldo Anggaran Lebih Akhir
 3. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah – jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
 4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi pendanaan, dan transitoris. Laporan operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang – kurangnya pos – pos :
 - a. Ekuitas awal
 - b. Surplus atau defisit-LO pada periode bersangkutan
 - c. Koreksi – koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya : Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode – periode sebelumnya. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap, Ekuitas akhir. Entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur – unsur yang terdapat dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 5. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan – ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki, menurut Mursyidi (2013:47) :

- a. Relevan. Informasi yang relevan : Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*). Informasi memungkinkan pengguna menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka dimasa lalu. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini. Tepat waktu, informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap, mungkin, yaitu mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.
- b. Andal. Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
- c. Dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya.
- d. Dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode lapangan (Field work Research) dan metode kepustakaan (Library Research). Penelitian ini dilakukan pada BPKAD Kutai Kartanegara tahun 2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapat dengan cara pengamatan langsung ke lapangan dengan melakukan wawancara berdasarkan konsep standar dari PP Nomor 71 Tahun 2010 dengan pihak terkait pada BPKAD Kutai Kartanegara khususnya yaitu Kepala Bidang Akuntansi. Data sekunder data yang didapat dengan cara mengumpulkan data – data berupa laporan keuangan BPKAD Kutai Kartanegara tahun 2017.

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Analisis Komparatif yaitu membandingkan antara laporan keuangan yang ada pada BPKAD Kutai Kartanegara dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan maka peneliti akan membuat checklist perbandingan untuk membandingkan antara laporan keuangan tersebut. Data yang diperoleh yaitu berupa laporan keuangan pemerintah daerah Kutai Kartanegara dilihat dan disesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP Pernyataan Nomor 1 Penyajian Laporan Keuangan kemudian dianalisis dan diterapkan kemudian ditarik kesimpulannya.

Teknik menghitung dalam penelitian ini menggunakan rumus Champion yang dikemukakan oleh Dean J. Champion (1990:302) perhitungan checklist dilakukan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Presentase = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \%$$

Hasil jawaban yang diperoleh dengan cara perhitungan diatas berguna seperti yang telah dikemukakan oleh Dean J. Champion (1990:302)

Tabel : Klasifikasi Kriteria

Presentase	Kriteria
0% - 25%	Dikategorikan Tidak Sesuai
26% - 50%	Dikategorikan Kurang Sesuai
51% - 75%	Dikategorikan Cukup Sesuai
76% - 100%	Dikategorikan Sangat Sesuai

(Sumber : Dean J. Champion 1990)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis

Laporan Realisasi Anggaran BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Laporan Realisasi Anggaran, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Presentase &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \% \\
 &= \frac{6}{14} \times 100\% \\
 &= 0.4285 \\
 &= 42.85 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa kurang sesuai sebesar 42.85% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 Presentase &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \% \\
 &= \frac{5}{5} \times 100\% \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa sangat sesuai sebesar 100% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Neraca BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Neraca, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \% \\ &= \frac{8}{16} \times 100\% \\ &= 0.5 \\ &= 50 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Neraca yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa kurang sesuai sebesar 50% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Operasional BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Laporan Operasional, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \% \\ &= \frac{5}{9} \times 100\% \\ &= 0.5555 \\ &= 55.55 \% \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Laporan Operasional yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa cukup sesuai sebesar 55.55% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Arus Kas BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Laporan Arus Kas, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{Presentase} &= \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \% \\ &= \frac{2}{8} \times 100\% \end{aligned}$$

$$= 0.25$$

$$= 25 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Laporan Arus Kas yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa tidak sesuai sebesar 25% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Perubahan Ekuitas BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Laporan Perubahan Ekuitas, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$Presentase = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \%$$

$$= \frac{4}{5} \times 100\%$$

$$= 0.8$$

$$= 80 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa sangat sesuai sebesar 80% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan BPKAD Kutai Kartanegara

Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, maka dapat dihitung nilai kriteria Catatan atas Laporan Keuangan, hasil perhitungan checklist komponen laporan keuangan sebagai berikut :

$$Presentase = \frac{\sum \text{Jumlah Jawaban "Ya"}}{\sum \text{Total Jawaban Checklist}} \times 100 \%$$

$$= \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$= 1$$

$$= 100 \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan penyajian laporan keuangan pada pos-pos Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara dapat disimpulkan bahwa sangat sesuai sebesar 100% dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Pembahasan

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara belum lengkap hanya menyajikan 6 pos laporan keuangan yang ada di Laporan Realisasi Anggaran yaitu Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit-LRA, Pembiayaan, dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran sehingga pos-pos yang ada di Laporan Realisasi Anggaran pada BPKAD Kutai Kartanegara tersebut belum memenuhi

kelengkapan pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara kurang sesuai sebesar 42.85% yang masuk dalam presentase 26% - 50% kriteria yang dikategorikan kurang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada BPKAD Kutai Kartanegara sudah mencakup pos-pos yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang disajikan meliputi Saldo Anggaran Lebih Awal, Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA), Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, Saldo Anggaran Lebih Akhir, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai sebesar 100% yang masuk dalam presentase 76% - 100% kriteria yang dikategorikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Neraca

Laporan keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara belum lengkap hanya menyajikan 8 pos laporan keuangan yang ada di Neraca yaitu Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana Cadangan, Aset Lainnya, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas sehingga pos-pos yang ada di Neraca pada BPKAD Kutai Kartanegara tersebut belum memenuhi kelengkapan pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Neraca yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara kurang sesuai sebesar 50% yang masuk dalam presentase 26% - 50% kriteria yang dikategorikan kurang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Operasional

Pos-pos Laporan Operasional BPKAD Kutai Kartanegara sudah mencakup pos-pos yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang disajikan meliputi Pendapatan-Laporan Operasional, Beban dari Kegiatan Operasional, Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional, Pos Luar Biasa, dan Surplus/Defisit-Laporan Operasional, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Laporan Operasional yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara cukup sesuai sebesar 55.55% yang masuk dalam presentase 51% - 75% kriteria yang dikategorikan cukup sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Arus Kas

Laporan keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara belum lengkap hanya menyajikan 2 pos laporan keuangan yang ada di Laporan Arus Kas yaitu Investasi dan Transitoris sehingga pos-pos yang ada di Laporan Arus Kas pada BPKAD Kutai Kartanegara tersebut belum memenuhi kelengkapan pos-pos laporan keuangan yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Laporan Arus Kas yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara tidak sesuai sebesar 25% yang masuk dalam presentase 0% - 25% kriteria yang dikategorikan tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Laporan Perubahan Ekuitas

Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas BPKAD Kutai Kartanegara sudah mencakup pos – pos yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang disajikan meliputi Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-Laporan Operasional, Koreksi Nilai Persediaan, dan Ekuitas Akhir, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Laporan

Perubahan Ekuitas yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai sebesar 80% yang masuk dalam presentase 76% - 100% kriteria yang dikategorikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Catatan atas Laporan Keuangan

Pos-pos Catatan atas Laporan Keuangan BPKAD Kutai Kartanegara sudah mencakup pos-pos yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 yang disajikan, meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas, sehingga hasil pengolahan data menunjukkan pos-pos Catatan atas Laporan Keuangan yang disajikan oleh BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai sebesar 100% yang masuk dalam presentase 76% - 100% kriteria yang dikategorikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Laporan Realisasi Anggaran yang disajikan pada BPKAD Kutai Kartanegara kurang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima karena BPKAD Kutai Kartanegara belum secara lengkap menyajikan Laporan Realisasi Anggaran yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
2. Penyajian pos-pos yang disajikan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih pada BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak karena pos-pos yang disajikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
3. Neraca yang disajikan pada BPKAD Kutai Kartanegara kurang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima karena BPKAD Kutai Kartanegara belum secara lengkap menyajikan Neraca yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
4. Penyajian pos-pos yang disajikan dalam Laporan Operasional pada BPKAD Kutai Kartanegara cukup sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak karena pos-pos yang disajikan cukup sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
5. Laporan Arus Kas yang disajikan pada BPKAD Kutai Kartanegara tidak sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya diterima karena BPKAD Kutai Kartanegara belum secara lengkap menyajikan Laporan Arus Kas yang sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
6. Penyajian pos-pos yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas pada BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak karena pos-pos yang disajikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.
7. Penyajian pos-pos yang disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan pada BPKAD Kutai Kartanegara sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, sehingga hipotesis yang diajukan sebelumnya ditolak karena pos-pos yang disajikan sangat sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. BPKAD Kutai Kartanegara, sebaiknya menerapkan penyajian pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang disesuaikan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010, agar penyajian laporan keuangan BPKAD

- Kutai Kartanegara tersebut relevan yang bermanfaat untuk pengguna laporan keuangan dalam memahami informasi-informasi pada laporan keuangan tersebut.
2. BPKAD Kutai Kartanegara, diharapkan dapat meningkatkan lagi dalam hal menyajikan laporan keuangan daerah yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku, agar dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

REFERENCE

- Anonim. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Hariadi. *dkk*. 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : ANDI
- Sadeli, Lili. 2014. *Dasar Dasar Akuntansi*. Jakarta : Bumi Aksara
- Mursyidi. 2013. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung : PT. Refika Aditama
- Najmudin. 2011. *Manajemen Keuangan Dan Aktualisasi Syariyyah Modern*. Yogyakarta : Andi Publisher